



Ida Keluhkan Sumur Resapan Gubernur Anies

▶ Jelang Lengser, Program ITF Baru Peletakan Batu Pertama ▶ Masa Tugas RT/RW Diperpanjang Jadi Lima Tahun

Kebon Sirih, Warta Kota

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, memaparkan sejumlah pekerjaan rumah atau PR dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendekati akhir masa jabatannya. Diketahui, masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Menurut Ida, ada sejumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 namun belum terselesaikan.

"Yah, RPJMD beliau ini banyak yang tidak terselesaikan," kata Ida kepada wartawan di Gedung DPRD, Kamis (19/5/22).

Pertama, kata Ida, pembuatan sumur resapan yang direncanakan di 1,8 juta titik, tetapi ternyata saat ini baru terbangun di angka puluhan ribu.

Alhasil penanganan musibah banjir yang selama ini menjadi masalah klasik di DKI Jakarta tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga lokasi-lokasi yang selama ini menjadi langganan banjir di DKI Jakarta tidak tertangani dengan baik dan kerap dikeluhkan masyarakat.

"Terkait banjir, sumur resapan yang programnya lumayan besar juga tidak



Terkait banjir, sumur resapan yang programnya lumayan besar juga tidak selesai, itu sih.

Ida Mahmudah

selesai, itu sih," ungkap Ida.

Selanjutnya, kata Ida, Intermediate Treatment Facility (ITF), yang dicanangkan dibangun pada empat titik. Namun, hingga saat ini fasilitas yang dibangun untuk mengatasi permasalahan sampah Jakarta tersebut tidak kunjung dibangun.

"ITF di empat titik,

ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya," kata Ida.

Ia berharap, dalam sisa beberapa bulan ini, ada pembangunan yang berlangsung baik dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya selaku penanggung jawab.

"Walaupun nanti pembangunannya baru berapa bata, minimal sudah ada pembangunan di masa tinggal berapa bulan lagi," kata dia.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan ITF Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/12/2018).

PT Jakpro mendapatkan tugas membangun ITF Sunter sebagai pusat dan ITF Wilayah Layanan Barat. Sementara Perumda Sarana Jaya untuk ITF Wilayah Layanan Timur dan Selatan.

DP Rp 0

Selanjutnya, program pembangunan hunian DP Rp 0 juga dinilai cukup baik meskipun belum maksimal.

"Kalau di Dinas Perumahan, memang dia ada target di RPJMDnya 14.500 sekian kamar, sudah terpenuhi di

(Bersambung ke him 11)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Ida Keluhkan Sumur Resapan Gubernur Anies

angka 13 ribu," kata Ida.

Namun, kritik yang Ida sampaikan terkait dengan hunian tersebut ialah pembangunannya yang terpusat di wilayah utara dan timur. Padahal, kebutuhan hunian juga dirasakan bagi warga yang tinggal di pusat, barat, dan selatan.

"Terutama selatan, terkait normalisasi kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru," kata dia.

Pemprov DKI ke depannya diminta konsentrasi untuk menyediakan hunian tidak hanya bagi masyarakat di kawasan utara dan timur namun juga tiga wilayah lainnya.

Garda terdepan

Sementara itu, legislator DKI Jakarta memuji langkah Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan yang memperpanjang masa bakti pengurus RT dan RW dari tiga tahun menjadi lima tahun di jelang masa jabatannya berakhir.

Kebijakan itu telah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 tahun 2022 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ditetapkan Anies pada 28 April 2022.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengaku bersyukur, Anies mau merevisi Pergub yang diteken kepala daerah sebelumnya. Kata dia, perubahan regulasi itu merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah apa yang kami suarkan dulu, kini

sudah terpenuhi. Perjuangan itu memang tidak sia-sia," kata Jupiter dari Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta pada Kamis (19/5/2022).

Jupiter mengaku, telah menyuarkan aspirasi masyarakat itu melalui Badan Anggaran (Banggar) pada tahun 2021 lalu. Dalam rapat Banggar tersebut, Jupiter menilai pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih kepada Pengrus RT/RW.

Posisi mereka dianggap vital dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antartetangga dan warga di lingkungannya.

"Karena itu, posisi mereka dianggap sebagai garda terdepan sebagai jembatan aspirasi masyarakat dengan

pemerintah daerah," tutur Jupiter.

Diketahui, menjelang pensiun sebagai kepala daerah pada 16 Oktober 2022 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa bakti Pengurus RT dan RW di wilayah setempat. Masa bakti Pengurus RT/RW tidak lagi tiga tahun, tetapi menjadi lima tahun.

Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 tahun 2022 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Kehadiran Pergub ini, secara otomatis menggugurkan aturan sebelumnya yang diteken Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni Pergub Nomor 171 tahun 2016 tentang Pedoman RT dan RW. (jhs/faf)